

Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021-2023

Rinaldi Rinaldi^{1*}, Alawi Parkindungan Hasibuan², Putri Kemala Dewi Lubis³, Jelita Simanungkalit⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: rinaldikoto0906@gmail.com, alawihhasibuan7@gmail.com, jelitafebiola14@gmail.com

*Korespondensi penulis: rinaldikoto0906@gmail.com

Abstract: Medan city is one of the largest cities in Indonesia. The increasing need for infrastructure amidst the increasing population in the city of Medan is a challenge that must be resolved. This research was conducted to evaluate the effectiveness of the Medan City Revenue and Expenditure Budget considering that the budget allocation for improving infrastructure that has been carried out by the Medan City Government is the government's priority. The research method used in this research is a descriptive analysis method with a qualitative approach. The results of the research found that effectiveness in managing the APBD is still less effective. In this case, the effectiveness of budget management still needs to be improved so that fund allocation can be optimized and create more inclusive and sustainable development.

Keywords: APBD, Budget, Effectiveness, budget effectiveness, city development, Medan City, regional financial management

Abstrak: Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Peningkatan kebutuhan akan infrastruktur di Tengah meningkatnya jumlah penduduk di kota Medan menjadi tantangan yang harus di selesaikan. Penelitian ini dilakukan guna mengevaluasi efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja kota Medan mengingat alokasi anggaran terhadap peningkatan infrastruktur yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan menjadi prioritas pemerintah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, ditemukan bahwa efektifitas dalam pengelolaan APBD masih kurang efektif. Dalam hal ini, efektifitas pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan sehingga alokasi dana dapat dioptimalkan dan menciptakan Pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: APBD, Anggaran, Efektifitas, efektifitas anggaran, pembangunan kota, Kota Medan, Pengelolaan keuangan daerah

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, serta menjadi salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya meletakkan kota ini pada keadaan dimana memiliki peranan strategis dalam perekonomian regional. Anggaran yang dikelola dengan efektif akan menjadi sebuah kunci dalam mendukung pembangunan kota, peningkatan kualitas layanan publik, serta kesejahteraan rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan penting dalam berbagai sektor Pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Periode kali ini, pemerintah kota Medan melakukan prioritas pada pembangunan infrastruktur di Kota Medan. Meskipun demikian tetap saja Peningkatan kualitas kesejahteraan berupa pendidikan dan kesehatan tidak luput dari perhatian pemerintah kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran sebesar 26,98% untuk pendidikan dan kesehatan 18.71%, yang mana tentunya sudah melebihi UU pengeluaran wajib. Hasil dari peningkatan

pengeluaran ini dibuktikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan atau saat ini berada pada 82.19% (BPS, 2023).

Peningkatan dalam berbagai Pembangunan tentunya menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah. Pasalnya, pemerintah kota Medan harus mengoptimalkan pendapatan guna melaksanakan belanja publik yang lebih prioritas. Namun, efektivitas anggaran tidak dilihat dari besarnya anggaran, namun dilihat dari besarnya alokasi dana yang dilakukan. Pemerintah kota Medan dihadapkan pada tantangan dalam memastikan alokasi anggaran menggambarkan bagian dari kebutuhan nyata masyarakat, melakukan efisiensi, serta mencegah korupsi. Penelitian kali ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan alokasi anggaran di kota Medan dalam mencapai tujuan peningkatan Pembangunan di kota Medan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kota Medan telah menampilkan komitmen guna melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Salah satu contoh adalah *e-budgeting* atau bagian dari penganggaran digital, serta melibatkan Masyarakat dalam Menyusun perencanaan anggaran guna memastikan keefektif-an anggaran serta alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Adanya prioritas Pembangunan infrastruktur sayangnya belum dapat meningkatkan serapan anggaran di Kota Ini. Pasalnya, serapan Anggaran di kota ini masih rendah, dibuktikan dengan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat efektifitas belanja yang memang kurang efektif. Diharapkan, penelitian ini menjadi penggambaran atas fenomena anggaran di kota Medan. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan ditemukannya langkah yang tepat dan bermanfaat bagi pemerintah kota Medan agar dapat meningkatkan efektifitas dalam mengelola anggaran ke depannya.

KAJIAN TEORITIS

Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan suatu rancangan yang sistematis mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, serta sumber pendapatan yang diharapkan dalam memberikan pembiayaan pada suatu hal dalam periode tertentu. Anggaran biasanya ditentukan dalam bentuk naskah tulisan yang tersusun secara teratur dan sistematis. Dalam sektor publik, anggaran merupakan instrument mekanisme birokrasi, sehingga anggaran menjadi alat akuntabilitas dalam mengelola uang publik, dan pelaksanaan program yang dibiayai uang publik (Ikhsan, 2019). Dalam menciptakan sebuah anggaran, diperlukan rangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk Menyusun sebuah anggaran. Rangkaian proses inilah yang dinamakan sebagai Penganggaran. Penganggaran sektor publik berkaitan dengan kegiatan penentuan jumlah alokasi dana dalam tiap program yang dijalankan atau aktivitas dalam satuan moneter (Agusti, 2012).

Didalam organisasi sektor publik terdapat prinsip-prinsip yang diacu oleh anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan anggaran. Setidaknya terdapat 7 prinsip yang menjadi acuan dalam menentukan anggaran menurut (Arifin, 2017) didalam bukunya, yaitu:

1. Berimbang dan Dinamis

Penyusunan anggaran seharusnya merefleksikan seimbangannya pengeluaran dengan penerimaan. Ketika terjadi perbedaan antara pengeluaran dengan penerimaan, dimana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka pemerintah dapat menyelaraskan keduanya yaitu dengan mengurangi pengeluaran.

2. Disetujui Oleh Legislatif

Anggaran sektor publik akan senantiasa berkaitan dengan akuntabilitas yang diperlukan legislatif. Pada kenyataannya, legislatif akan meminta daftar anggaran (daftar tahunan mengenai pengeluaran, pendapatan, serta tujuan anggaran. Sebelum pihak eksekutif membelanjakan anggaran tersebut, pihak eksekutif seharusnya mendapatkan otoritas atau persetujuan dari legislatif.

3. Komprehensif

Komprehensif merupakan salah satu prinsip anggaran, dimana keseluruhan aktivitas yang melibatkan pengeluaran dan pendapatan haruslah sesuai sebagaimana mestinya atau sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini akan tercipta Efektifitas dan Efisien.

4. Efektifitas dan Efisien

Dalam anggaran, sangat ditekankan untuk seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini guna menciptakan anggaran yang tepat guna, dan dapat menyelesaikan permasalahan utama negara serta menciptakan perekonomian nasional yang baik.

5. Mandiri

Organisasi harus mampu mengelola sumberdaya yang mereka miliki, baik itu berbentuk pendapatan ataupun dalam bentuk pengeluaran. Sehingga dapat mengembangkan potensi guna mengurangi adanya ketergantungan terhadap organisasi lain.

6. Tepat sasaran

Tepat sasaran merupakan prinsip dalam penganggaran. Dalam membuat rancangan anggaran, anggaran tidak seharusnya memasukkan Cadangan yang tersembunyi, yang tentunya berpotensi untuk terjadinya korupsi dan Inefisiensi Anggaran. Dalam hal ini dapat dikatakan semua rancangan anggaran harus ditetapkan tujuan terlebih dahulu, sehingga sebagaimana prinsipnya, anggaran yang telah dibuat dapat tepat sasaran.

7. Mudah dipahami

Anggaran sebenarnya hal yang harus disusun dalam bentuk yang paling sederhana. Setidaknya, laporan anggaran dibuat agar keseluruhan pembaca dapat mengambil manfaat darinya. Selain ditulis dengan kalimat yang mudah dipahami, Anggaran juga dituntut untuk efisien dan efektif.

Saat ini pemerintah telah menetapkan undang-undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2024 yang termuat dalam undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang disusun sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta kemampuan menghimpun pendapatan negara dalam rangka guna mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengikuti prinsip kebersamaan, penghematan (efisiensi), berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional (UU No. 19 Tahun 2023, 2023). Di dalam undang-undang ini ditekankan efektifitas dan efisiensi, dimana program pengelolaan subsidi yang merupakan bagian dari anggaran ditekankan untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan Masyarakat.

Efektifitas

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam studi Mandala Harefa, efektivitas merupakan korelasi antara output dengan tujuan yang ingin dicapai (Harefa, 2016). Artinya, suatu kegiatan akan dapat dikatakan efektif jika telah mencapai tujuan yang telah dikemukakan (*Spending Wisely*). Dalam konteks sektor publik, efektifitas sangat diperlukan mengingat penerimaan dalam anggaran sektor publik sebagian besar berasal dari pajak. Masyarakat yang membayar pajak, tentunya menginginkan uangnya dapat digunakan sebaik mungkin dan dapat mencapai tujuan Bersama yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, pemerintah harus membelanjakan uang pajak Masyarakat yang telah dikumpulkan seefektif mungkin.

a. Efektifitas Belanja

Efektifitas belanja merupakan ratio hasil perbandingan antara Belanja yang direncanakan dengan Realisasi Anggaran yang dibelanjakan. Efektifitas ini tentunya memiliki tujuan dalam pembuatannya yaitu guna mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam merancang target belanja serta sejauh mana pemerintah dapat merealisasikan anggaran belanja yang mereka dapatkan (Kosmas, 2022). Pengukuran Efektifitas Belanja juga dilakukan dengan tujuan meningkatkan aransparansi dan akuntabilitas Pemda, menjadi langkah penting dalam mengambil keputusan khususnya melakukan evaluasi kinerja atas sejauh mana anggaran dapat direalisasikan. Dalam hal ini Perhitungan Efektivitas Pendapatan dan Belanja merupakan langkah untuk mengetahui bahwa sumberdaya yang

digunakan sudah sejauh mana alokasinya, guna menciptakan tujuan yang lebih optimal serta bertanggung jawab.

b. Efektifitas Pendapatan

Efektifitas pendapatan merupakan ratio hasil perbandingan antara Pendapatan yang direncanakan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efektifitas pendapatan dibuat guna mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam melakukan penyusunan target pendapatan serta realisasi anggaran pendapatan yang mereka lakukan (Kosmas, 2022). Pengukuran efektifitas pendapatan juga bertujuan untuk memberikan gambaran untuk mengambil sebuah keputusan saat merencanakan strategi untuk meningkatkan pendapatan. Efektifitas pendapatan juga akan membentuk sejauh mana transparansi dan akuntabilitas Pemda dapat berjalan. Dalam hal ini pemda dapat memastikan jika pendapatan yang didapat sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sangat memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ariel Sharon Sumenge dalam jurnalnya yang berjudul **“Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan”** mengemukakan bahwa tingkat efektifitas anggaran belanja BAPPENDA Minahasa Selatan dalam periode tahun 2008-2012 masih dikatakan fluktuatif, selain itu tingkat efektifitasnya berada pada tingkat efektif sampai kurang efektif. Hal ini terjadi dikarenakan masih terdapat kegiatan yang dianggarkan namun tidak dapat terealisasikan. Disisi lain, efisiensi dalam realisasi anggaran belanja BAPPENDA Minahasa Selatan sudah sangat baik. Dari tahun 2008-2011 kriteria efisiensi realisasi anggaran tergolong sangat efisien, hanya saja pada tahun 2012 kriterianya turun menjadi efisien. Meski demikian kegiatan pengelolaan anggaran belanja BAPPENDA Minahasa Selatan dapat dikatakan telah memenuhi syarat efisiensi dimana penggunaan anggaran seminim mungkin dalam mencapai hasil yang maksimum (Sumenge, 2013).

Penelitiannya lainnya yang berkaitan dengan analisis realisasi anggaran adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Heri Prasetyo, dan Agustina Prativi Nugraheni dalam jurnal yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019”** menerangkan bahwa tingkat efektifitas penyerapan anggaran masih fluktuatif. Selama periode 2015-2019, pada tahun 2018 dan 2019 penyerapan anggaran dikatakan efektif (90,65% dan 93,86%), tahun 2015-2016 penyerapan anggaran cukup efektif (89,96% dan 88,97%), sementara itu di tahun 2017

penyerapan anggaran dikatakan kurang efektif yaitu berada pada 76,91%. Sementara itu, untuk tingkat efisiensi anggaran DISDUKCAPIL Kota Magelang periode 2015-2019 dikatakan tidak efisien. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyaknya ketidaksesuaian antara belanja dengan anggaran yang telah disahkan (Prasetyo, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian berikut merupakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif, secara simple diartikan metode penelitian yang tidak berkaitan dengan olah data. Metode kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian yang merupakan pembelajaran yang meneliti sebuah kualitas aktivitas, situasi dan hubungan. Penelitian kualitatif dalam pelaksanaannya, lebih menekankan pada penjelasan detail mengenai suatu kondisi atau fenomena yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian kualitatif berguna untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan manusia, ataupun fenomena sosial (Sugiyono, 2022). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak ketiga dan tentunya data tersebut kredibel dan dapat dipastikan kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang dipakai merupakan Teknik observasi (pengamatan). Adapun data yang digunakan merupakan data yang berasal dari website *Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara* (PEMPROVSU, 2024). Website PRP2 Sumut merupakan website yang dipelopori oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui Biro Administrasi Pembangunan, Pemprovsum membangun aplikasi PRP2 Sumut dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian dan pelaksanaan Pembangunan daerah secara elektronik.

Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif merupakan statistik yang dipakai untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data, menceritakan data, atau mendeskripsikan data yang telah diambil dari sumber yang kredibel (Sugiyono, 2022). Analisis dilakukan dengan mengukur tingkat efektifitas pendapatan dan belanja. Angka hasil berupa ratio efektifitas ini kemudian dianalisis untuk mengetahui pembahasan dari hasil analisis.

Tingkat efektifitas anggaran belanja diukur dengan melakukan perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$EFEKTIFITAS = \frac{REALISASI\ ANGGARAN\ BELANJA}{TARGET\ ANGGARAN\ BELANJA} \times 100\%$$

Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, terdapat beberapa kriteria efektifitas anggaran belanja, diantaranya sebagai berikut:

1. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diatas 100%, maka kriterianya sangat efektif.
2. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 90% - 100%, maka kriterianya efektif.
3. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 80% - 90%, maka kriterianya cukup efektif.
4. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 70% - 80%, maka kriterianya kurang efektif.
5. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada dibawah 60%, maka kriterianya tidak efektif.

Sementara itu, untuk mengukur tingkat Efektifitas Anggaran Pendapatan dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran pendapatan (Putri Kemala Dewi Lubis, 2024).

$$EFEKTIFITAS = \frac{REALISASI\ ANGGARAN\ PENDAPATAN}{TARGET\ ANGGARAN\ PENDAPATAN} \times 100\%$$

Untuk kriteria Efektifitas Anggaran Pendapatan sama dengan bagaimana melihat kriteria efektifitas anggaran belanja yaitu dengan mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, diantaranya sebagai berikut:

1. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diatas 100%, maka kriterianya sangat efektif.
2. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 90% - 100%, maka kriterianya efektif.
3. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 80% - 90%, maka kriterianya cukup efektif.
4. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 70% - 80%, maka kriterianya kurang efektif.
5. Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada dibawah 60%, maka kriterianya tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel I Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja

TAHUN	TARGET ANGGARAN BELANJA	REALISASI ANGGARAN BELANJA	TINGKAT EFEKTIFITAS
2021	Rp. 5.731.395.062.275	Rp. 4.500.515.560.809	Kurang Efektif
2022	Rp. 7.668.720.191.488	Rp. 6.047.157.448.152	Kurang Efektif
2023	Rp. 7.844.702.182.572	Rp. 6.246.261.417.557	Kurang Efektif

Sumber: Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara

Dari Tabel I dapat dianalisis bagaimana anggaran belanja negara Indonesia selalu mengalami peningkatan. Seperti di tahun 2023 mengalami peningkatan anggaran belanja yang sebelumnya berada pada **Rp. 7.668.720.191.488** namun berubah menjadi **Rp. 7.844.702.182.572**. Peningkatan ini biasanya sejalan dengan Realisasi anggaran. Artinya, dalam meningkatkan target belanja maka realisasinya juga akan meningkat.

Tabel II Tingkat Efektifitas Anggaran Pendapatan

TAHUN	TARGET ANGGARAN PENDAPATAN	REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN	TINGKAT EFEKTIFITAS
2021	Rp. 5.208.964.175.119	Rp. 5.021.257.837.136	Efektif
2022	Rp. 6.522.123.770.774	Rp. 5.657.816.889.106	Cukup Efektif
2023	Rp. 7.296.157.352.009	Rp. 5.813.878.846.669	Kurang Efektif

Sumber: Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara

Sementara itu, Dari Tabel II dapat dilihat analisis bagaimana anggaran pendapatan negara Indonesia mengalami peningkatan. Dilihat dari tahun 2021-2022 peningkatan anggaran pendapatan mengalami perubahan yang fluktuatif. Ditahun 2021 target anggaran pendapatan berada pada **Rp. 5.208.964.175.119**. Di tahun selanjutnya yaitu 2022 target anggaran pendapatan mengalami peningkatan hingga **Rp. 6.522.123.770.774** artinya telah terjadi peningkatan target anggaran pendapatan di tahun 2023. Biasanya, peningkatan target anggaran pendapatan akan sejalan dengan meningkatnya realisasi anggaran pendapatan.

Pembahasan

a. Tingkat Efektifitas Anggaran Pendapatan

Tingkat efektifitas Anggaran Pendapatan Kota Medan pada tahun 2021 dengan tingkat efektifitas kurang efektif.. Pada tahun 2022 Kota Medan masih saja mendapatkan tingkat efektifitas kurang efektif. Kemudian di tahun 2023 tingkat efektifitasnya juga masih kurang efektif. Keadaan ini diakibatkan beberapa faktor seperti kurang optimalnya pengaturan retribusi parkir, pemungutan pajak, dan lain sebagainya. Nilai efektifitas anggaran pendapatan ini harusnya menjadi langkah awal yang dapat diperhatikan dalam melakukan pengambilan keputusan. Keadaan ini tentunya membantu kita mencontohkan bahwa efektifitas anggaran pendapatan sangat diperlukan.

b. Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja

Berdasarkan data yang telah dikemukakan, didapat hasil bahwa Kota Medan pada tahun 2021 memiliki tingkat efektifitas “Efektif”. Ke tahun selanjutnya yaitu 2022, Kota Medan memiliki tingkat efektifitas cukup efektif atau mengalami penurunan berat dari tahun sebelumnya yang telah memiliki tingkat efektifitas “efektif”. Ditahun 2023 tingkat Efektivitas Kota ini juga makin menurun, yaitu dengan tingkat efektifitas “kurang efektif”. Hal ini harusnya menjadi pembenahan kepada sektor publik untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas. Tingkat Efektifitas juga dapat digunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang melibatkan anggaran.

KESIMPULAN

Tingkat Efektifitas Belanja Kota Medan cukup stabil yaitu berada pada tingkat Kurang efektif. Hal ini menggambarkan beberapa hal diantaranya masih banyak terdapat kekurangan khususnya dalam realisasi anggaran belanja. Dengan dampak perencanaan yang kurang tepat, pengawasan dan pengendalian yg lemah mengakibatkan realisasi lebih sedikit dari target yang telah dikemukakan.

Tingkat Efektifitas Anggaran Pendapatan Kota Medan cukup fluktuasi. Hal ini diperkuat dengan perubahan tingkat efektifitas di setiap tahunnya. Kemudian untuk tingkat Efektifitas Anggaran tahun 2021, 2022, dan 2023 tingkat efektifitasnya secara berurut adalah Efektif, Cukup Efektif, dan Kurang Efektif. Kurangnya efektif dalam realisasi pendapatan dikarenakan beberapa faktor seperti kurang optimalnya pengaturan retribusi parkir, pemungutan pajak, serta manajemen yang kurang transparan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan antara realisasi anggaran dengan Target anggaran pendapatan. (MEDAN, 2024).

SARAN

Meskipun Pembangunan menjadi prioritas dalam alokasi anggaran belanja di kota ini, sayangnya serapan anggaran masih rendah. Maka dari itu, Efektifitas anggaran kota Medan masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga perlu untuk ditingkatkan agar lebih baik lagi. Saran ini diharapkan dapat ikut menyumbangkan pemikiran dalam membantu pemerintah untuk melakukan pengoptimalan pada pengelolaan anggaran guna menciptakan Pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, R. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Ekonomi*, 1.
- Arifin, J. (2017). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- BPS. (2023, Desember 29). Indeks pembangunan manusia (Metode baru), 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Sumatera Utara: <https://sumut.beta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTkjMg==/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>
- Harefa, M. (2016). Kendala implementasi dan efektivitas pemungutan pajak PBB-P2 oleh pemerintah kota Makassar. *Jurnal DPR*, 72.

- Ikhsan, A. (2019). Akuntansi sektor publik (Edisi Revisi). Medan: Madenatera.
- Kosmas, I. (2022). Analisis efektivitas anggaran pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah Kabupaten Bengkayang. In Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI 2022 (p. 476). Tanjung Pura: Universitas Tanjung Pura (UNTAN).
- Medan, P. K. (2024). Transparansi pengelolaan anggaran daerah Kota Medan. Retrieved from portal.pemkomedan:
<https://portal.pemkomedan.go.id/menu/pemerintahan/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-kota-medan>
- Pemprovsu. (2024). Progress report pengendalian pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Retrieved from prp2sumut.sumutprov: <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail-2023/NWp4YXZRbmx4UkV3bUU0SjhQdnVRQT09>
- Prasetyo, W. H. (2020). Analisis realisasi anggaran belanja dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang periode 2015 – 2019. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 7-9.
- Putri Kemala Dewi Lubis, E. N. (2024). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan. As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal, 329.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, 76.
- UU No. 19 Tahun 2023. (2023, Oktober 16). Retrieved from Database Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/267797/uu-no-19-tahun-2023>